

ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2008 – 2013



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

RADITYO YUDI WIBISONO
NIM.C2B009038

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Radityo Yudi Wibisono

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB,
PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN
TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2008 - 2013**

Dosen Pembimbing : Fitrie Arianti, SE, M.Si

Semarang, 19 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Fitrie Arianti, SE, M.Si)
NIP .19781116 200312 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Radityo Yudi Wibisono

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB,
PENGANGGURAN, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI
JAWA TENGAH TAHUN 2008 - 2013**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Maret 2015

Tim Penguji

1. Fitrie Arianti, SE, M.Si (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Mengetahui
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Radityo Yudi Wibisono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2008 - 2013**

adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atautidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Radityo Yudi Wibisono)

NIM : C2B009038

Abstract

Poverty is one of the problems that always appear in public life. The implications of the poverty problems can involve all the aspects of human life, although its presence is often not aware of it by man concerned. Efforts to reduce the level of poverty can not be run in partial, but it must be related to various aspect with regard to the basic needs of the community. The study is done to analyze a bunch of factors affect the level of poverty in 35 districts there are in the province of central java during the period 2008-13. This factor is the gdp growth rate, open unemployment rate and education.

Sample used in this research is taken from secondary data published by the central statistics agency (BPS) which then analyzed using methods linear regression panel data with the approach effect fixed model and stuck dummy side variables into an equation. Analysis with this method commonly called least square dummy of variable (LSDV).

These studies yield conclusions that gdp has a highly variable influence towards poverty. The variables unemployment shows the presence of significant positive relationship and against poverty. However, the level of education it has significant impact on poverty.

Keywords: poverty, gdp growth rate, unemployment, least square dummy variable (LSDV)

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2013. Faktor tersebut adalah Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terbitan Badan pusat Statistik (BPS) yang kemudian dianalisis menggunakan metode Regresi Linier panel data dengan pendekatan *fixed effect model* dan memasukan variable *dummy* ke dalam persamaan. Analisis dengan metode tersebut biasa disebut dengan *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi, tingkat pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Laju pertumbuhan PDRB, Pengangguran, Least Square Dummy variabel (LSDV)

KATA PENGANTAR

Segala syukur hanya bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisi Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008-2013”.

Tulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua, Slamet Sri Wasito dan Endiek Sri Widjanarti, S.Sos, serta Kakak, Yuda Satria Seta, S.T atas dukungan moril dan materil yang tiada henti kepada penulis.
2. Dr. Suharnomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Fitrie Arianti, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Banatul Hayati, S.E, M.Si selaku dosen wali yang selalu memberi pengarahan selama penulis menjalani studi di Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar yang telah memberi bekal akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh mahasiswa IESP Angkatan '09 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktunya untuk selalu berbagi dalam suka dan duka.
7. Keluarga besar Kost Pojok Nirwanasari Cluster dan Kost Tegalsari, atas kesediaannya menjadi keluarga selama penulis menjalani studi yang jauh dari kota asal.
8. Seluruh Organisasi Mahasiswa di lingkungan FEB Undip, terutama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Jurusan IESP periode 2009/2010 dan 2010/2011. Terimakasih atas kesediannya menjadi partner penulis dalam berdialektika, bertukar wawasan, dan berbagi pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal untuk menatap masa depan.
9. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 19 Maret 2015

Penulis

Radityo Yudi Wibisono

NIM. C2B009038

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan.....	15
2.1.1.2 Indikator Kemiskinan.....	17
2.1.1.3 Teori Penyebab Kemiskinan	21
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25
2.1.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	27
2.1.3 Pendidikan	28
2.1.3.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan	30
2.1.4 Kesehatan.....	31
2.1.4.1 Pengaruh Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	34

2.1.5 Pengangguran	34
2.1.5.1 Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan	37
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODELOGI PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.1.1 Variabel Penelitian	44
3.1.2 Definisi Operasional	44
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4 Metode Analisis	48
3.4.1 Metode Analisis Data Panel	48
3.4.2 Estimasi Model.....	51
3.4.3 Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Variabel <i>Dummy</i>	53
3.5 Hausman Test.....	56
3.6 Deteksi Asumsi Klasik.....	56
3.6.1 Deteksi Normalitas	57
3.6.2 Deteksi Multikolinearitas	58
3.6.3 Deteksi Autokorelasi	59
3.6.4 Deteksi Heteroskedastisitas.....	59
3.6.5 Metode <i>Newey-West</i> Untuk Memperbaiki Standard Error OLS	60
3.7 Uji Signifikansi	61
3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)	61
3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	62
3.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	65
4.2 Analisa Data.....	66
4.2.1 Kemiskinan.....	66

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	68
4.2.3 Tingkat Pengangguran	70
4.2.4 Pendidikan	72
4.2.5 Kesehatan.....	74
4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	76
4.3.1 Deteksi Normalitas	77
4.3.2 Deteksi Multikolinearitas	78
4.3.3 Deteksi Autokorelasi	79
4.3.4 Deteksi Heterokedastisitas.....	80
4.4 Pengujian Statistik Analisis Regresi	81
4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	81
4.4.2 Koefisien Determinasi (Uji R ²)	82
4.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	83
4.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	83
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	90
5.3 Keterbatasan Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa (%)	5
Tabel 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah	6
Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	7
Tabel 1.4 Angka Partisipasi Kasar (persen), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), Angka Melek Huruf (persen) di Provinsi Jawa Tengah 2008-2013	8
Tabel 1.5 Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013....	9
Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (jiwa).....	10
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013	67
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (persen).....	69
Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013	71
Tabel 4.4 Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah (SMA) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan yang Sedang Ditempuh di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.....	73
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013	75
Tabel 4.6 Hasil Regresi Utama Pengaruh PDRB, Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008-2013.....	76
Tabel 4.7 R ² Hasil <i>Auxiliary Regression</i> Model Persamaan.....	78
Tabel 4.8 Hasil Deteksi Autokorelasi (Uji <i>Breush Godfrey</i>)	79

Tabel 4.9 Hasil Deteksi Heterokedastisitas.....	80
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Uji t	81
Tabel 4.11 Hasil Estimasi R^2	82
Tabel 4.12 Hasil Regresi Panel Data.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008-2013	3
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	23
Gambar 2.2 Hubungan Antara Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi.....	33
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	43
Gambar 4.1 Hasil Deteksi Normalitas	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Variabel Penelitian	95
Lampiran B Hasil Regresi Utama	102
Lampiran C Deteksi Asumsi Klasik	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan, 1993).

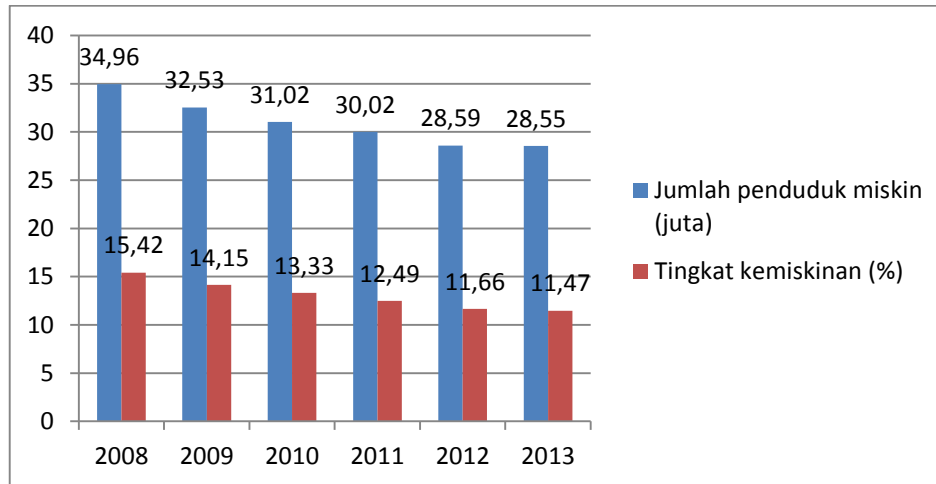
Mubyarto (2004) mengatakan bahwa: “Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi. Selanjutnya dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, rendahnya penyediaan air bersih, terbatasnya perumahan layak huni, belum meratanya pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan rendah, serta dari keseluruhannya saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung (Andre Bayo Ala dalam Winarendra, 1997).

Permasalahan kemiskinan di berbagai negara, khususnya negara sedang berkembang, telah menarik perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan berkomitmen menghapus kemiskinan melalui program *Millenium Development Goals* (MDGs). Program tersebut dijabarkan ke dalam 8 *point* pokok yang ingin dicapai pada tahun 2015, yaitu meliputi (1) mengentaskan kemiskinan dan kelaparan absolut, (2) mencapai pendidikan dasar secara universal, (3) meningkatkan dukungan persamaan gender dan pemberdayaan wanita, (4) menurunkan tingkat mortalitas anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) menurunkan persebaran HIV/AIDS, (7) meningkatkan keberlangsungan lingkungan, dan (8) mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan (BAPPENAS).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan yang ada. Hal itu dapat dilihat dari sasaran utama penanggulangan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

Secara rinci target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008 – 2013



Sumber: BPS, Statistik Nasional Berbagai Tahun

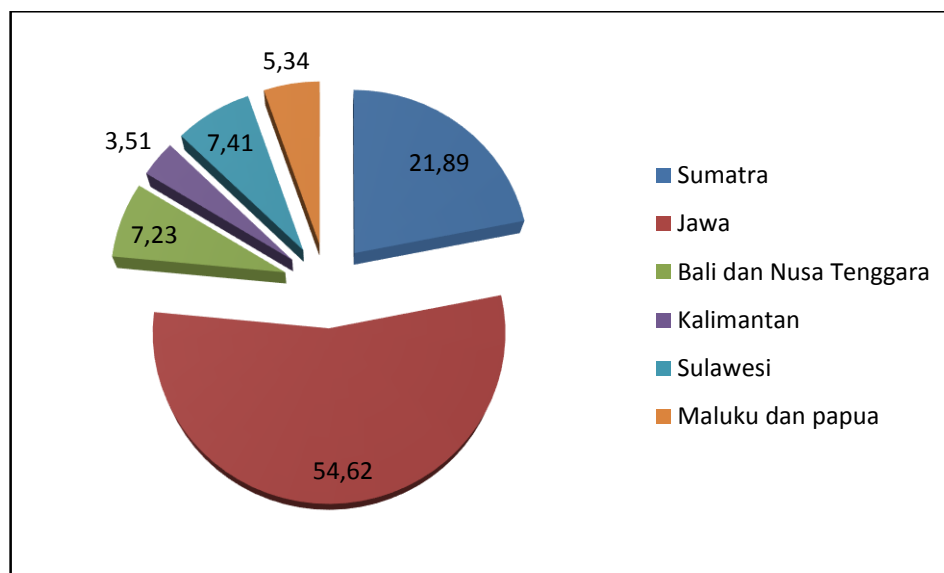
Tingkat kemiskinan di Indonesia selama tahun 2008-2013 terus mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun presentase tingkat kemiskinan. Pada Gambar 1.1 terlihat presentase penduduk miskin terus menurun dari 15,42 % pada tahun 2008 menjadi 11,47 % pada tahun 2013.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster1, 2, dan 3). Namun dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan karena meingkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antar program penanggulangan kemiskinan (BAPPENAS, 2013)

Meskipun data menunjukkan adanya penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, tetapi hal tersebut belum memenuhi target yang tertuang dalam RPJMN 2004 yaitu 8,2% pada Tahun 2009, sedangkan realita di lapangan tingkat kemiskinan tahun 2009 masih berada di angka 14,15%.

Indonesia menghadapi tantangan *triple track problems* yaitu penurunan tingkat kemiskinan, kerentanan kemiskinan yang tinggi, serta peningkatan kesenjangan pendapatan (Tim Komite Ekonomi Nasional, 2014). Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan memiliki tantangan mengingat jumlah penduduk miskin yang tersisa adalah kelompok miskin kronis dengan lokasi tempat tinggal yang menyebar.

Gambar 1.2
Persebaran Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia (September 2014)



Sumber: BPS, Statistik Nasional September 2014, diolah.

Dari Gambar 1.2 terlihat bahwa persebaran penduduk miskin di Indonesia lebih dari setengahnya terkonsentrasi di pulau Jawa dengan proporsi sebesar 54,62

persen. Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang tinggal di pulau Jawa.

Penanggulangan kemiskinan yang komperhensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan.

Apabila dilihat berdasarkan pembagian wilayah, tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa adalah Provinsi D.I Yogyakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 19,9 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 18,58 perssen.

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa(%)

Provinsi	Tingkat Kemiskinan						Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
DKI Jakarta	4,29	3,62	3,48	3,75	3,69	3,72	4,51
Jawa Barat	13,01	11,96	11,27	10,65	10,09	9,61	13,31
Jawa Tengah	19,23	17,72	16,56	15,76	15,34	14,44	19,77
DI Yogyakarta	18,32	17,23	16,83	16,08	16,05	15,03	19,90
Jawa Timur	18,51	16,68	15,26	14,23	13,40	12,73	18,16
Banten	8,15	7,64	7,16	6,32	5,85	5,89	8,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia berbagai tahun

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sendiri memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2013 berangsur-angsur menurun yaitu sebesar 19,23 persen di tahun 2008 menjadi 14,44 persen di tahun 2013. Angka tersebut masih terbilang tinggi karena tergolong *hard core* (>10 persen) yang mengindikasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah provinsi masih belum berjalan dengan optimal.

Di sisi lain, pencapaian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah juga masih belum memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD 2008-2013.

Tabel 1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah 2008-2013

Tahun	Target Presentase Tingkat Kemiskinan (%)	Realisasi Presentase Tingkat Kemiskinan (%)
2009	20,95	17,72
2010	18,59	16,56
2011	15,49	15,76
2012	14,34	15,34
2013	13,27	14,44

Sumber: BPS, Statistik Nasional, Berbagai tahun, RPJMD 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013, memberikan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional.

Pengurangan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2008-2013. Presentase

penduduk miskin ditargetkan harus menurun dari 20,95 persen di tahun 2009 menjadi 13,2 persen pada tahun 2013. Target ini disusun dengan memperhatikan amanat kesepakatan MDG's. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tiap tahunnya masih belum terpenuhi. Selain dari belum terpenuhinya target yang ingin di capai pemerintah Provinsi, tingkat penurunan kemiskinan di Jawa Tengah juga mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya pendanaan, belum sinergisnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, dan belum optimalnya perang dunia usaha/swasta.

Kinerja perekonomian secara keseluruhan salah satunya dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah rincian PDRB menurut harga konstan 2000 di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang digambarkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan 2000 dan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2008	168.034.483,29	5,61
2009	176.637.456,57	5,14
2010	186.992.985,50	5,84
2011	198.270.117,94	6,03
2012	210.848.424,04	6,34
2013	223.099.740,34	5,81

Sumber: BPS Statistik Indonesia, 2014

Selama kurun waktu 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan meskipun laju pertumbuhannya bergerak secara perlahan

yaitu 5,61 persen pada tahun 2008 menjadi 5,81 persen di tahun 2013 yang tergambar pada Tabel 1.3. Nilai PDRB atas harga konstan Tahun 2000 periode 2008-2013 mengalami peningkatan sebesar 53,086 Trilyun Rupiah. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,81 persen. Penurunan tersebut disebabkan kondisi perekonomian global yang belum mengalami perbaikan yang signifikan. Dari sisi sektoral, perlambatan terjadi pada sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari pembentukan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas seseorang.

Tabel 1.4
Angka Partisipasi Kasar (Persen), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), Angka Melek Huruf (Persen) di Provinsi Jawa Tengah 2008-2013

Tahun	Angka Partisipasi Kasar			Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Angka Melek Huruf (persen)
	SD	SMP	SMA		
2008	106,79	92,62	53,51	6,86	89,2
2009	107,31	96,93	54,87	7,07	89,4
2010	108,00	99,40	64,62	7,24	89,9
2011	114,93	99,72	64,93	7,29	90,3
2012	109,06	100,50	67,00	7,39	90,4
2013	109,08	100,52	70,00	7,43	90,7

Sumber: Jawa tengah Dalam Angka dan Kemendikbud Jawa Tengah, 2013

Dalam Tabel 1.4, Angka Partisipasi Kasar secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Untuk APK SMP meningkat dari 92,62 di tahun 2008 menjadi 100,50 di tahun 2012. APK SMA masih relatif rendah yaitu sebesar 70 persen di tahun 2013, meskipun mengalami peningkatan dari 53,51 persen di tahun 2008. Relatif rendahnya APK SMA disebabkan oleh

beberapa hal antara lain biaya pendidikan yang terbilang tinggi, letak geografis SMA/SMK/MA yang relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana. Selain itu, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 7,43 Tahun di tahun 2013 dari 6,86 di tahun 2008. Angka Melek Huruf juga mengalami peningkatan meskipun terbilang sangat lambat, yaitu dari 89,2 di tahun 2008 menjadi 90,7 di tahun 2013.

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Jiwa)

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
1	2008	7,35
2	2009	7,33
3	2010	6,21
4	2011	5,93
5	2012	5,63
6	2013	6,02

Sumber : BPS Statistik Indonesia, Berbagai Tahun

Indikator pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya akan mempengaruhi produktivitas dan tingkat penyerapan dalam lapangan pekerjaan. Dalam Tabel 1.5, jumlah pengangguran yang ada di Jawa Tengah cenderung menurun setiap tahunnya, yaitu 1.227.308 orang pada tahun 2008 menjadi 962.010 pada tahun 2012. Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode 2008-2012 menurun sebesar 1,72 persen, yaitu 7,35 persen di tahun 2008 menjadi 6,02 persen di tahun 2013. Hal itu menunjukkan semakin baiknya penyerapan tenaga kerja dan semakin lebarnya kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja perekonomian provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan bisa dikatakan baik apabila dilihat dari berbagai indikator. PDRB Jawa tengah memiliki kecenderungan meningkat, yaitu sebesar 168.034.483,29 juta pada tahun 2008 menjadi 223.099.740,34 juta pada tahun 2013. Struktur pembentuk PDRB Provinsi Jawa tengah tersebut didominasi oleh tiga sektor yang memberikan kontribusi cukup besar, dan salah satunya adalah pertanian dimana banyak terdapat penduduk miskin yang bekerja di sektor tersebut (EKPD Jateng, 2014). Kondisi pengangguran yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Jawa Tengah juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada periode yang sama. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan yang menjadi faktor penentu produktivitas manusia di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan pada periode yang sama.

Perbaikan kinerja ekonomi tersebut tidak berpengaruh baik terhadap tingkat kemiskinan yang terdapat di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2008-2013 masih tergolong sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 19,77 persen. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti PDRB, pengangguran terbuka, dan pendidikan belum maksimal dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Jawa Tengah pada periode 2008-2013. Oleh karena itu dalam penelitian ini diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?

2. Bagaimana Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam memahami pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam mengambil kebijakan ataupun melakukan kajian ilmiah tentang kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, yaitu mengenai gambaran secara umum kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi

Jawa Tengah. Dari latar belakan tersebut maka disusunlah suatu rumusan masalah. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II : Telaah Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang relevan bagi penelitian ini. Selain landasan teori, bab ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini, kemudian ditutup dengan Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian, termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai data dan metode analisis data. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian yaitu seluruh Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2013. Dalam bab ini juga akan diuraikan hasil dan pembahasan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga akan berisi saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan yang menjadi suatu masalah di beberapa negara berkembang merupakan gambaran dari kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang berlaku. Berbagai teori muncul untuk menegaskan penjelasan tentang kemiskinan.

Kuncoro (2006) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dikutip dari BAPPENAS, 2010) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga, yaitu membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan; keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), Keluarga sejahtera II (KS-II), Keluarga III (KS-III) dan keluarga sejahtera III plus (KS-III plus). Keluarga Sejahtera I adalah kelompok orang yang termasuk dalam klasifikasi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Klasifikasi Keluarga Sejahtera II yaitu kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan psikologi (*psychological needs*) dan klasifikasi Keluarga Sejahtera III adalah kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pengembangan (*developmental needs*).

Menurut Todaro (dikutip dari Permana, 2012) melihat kemiskinan dari 2 sisi, yaitu ;

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk

yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

2.1.1.2 Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2010) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Lebih jauh lagi, BPS menggunakan garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari batas kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk melihat kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang rill dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Oleh karena itu penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dimasukkan ke dalam kelompok penduduk miskin.

Makanan dan non-makanan mempengaruhi penentuan pilihan komoditi (Kuncoro, 1997). Harga, selera, dan pendapatan akan menentukan pilihan komoditi yang akan dikonsumsi dan besarnya nilai pengeluaran non-makanan. Hal itu berarti proporsi pengeluaran non-makanan merupakan fungsi harga-harga,

selera, dan pendapatan. Jika tingkat pendapatan masyarakat pada kelas D1-D2 dianggap tidak terlalu berbeda, berarti ;

$$\text{Perbandingan COL} = \frac{\text{PNFk}}{\text{PNFp}} \quad (2.1)$$

Dimana :

COL = *Cost of Living*, yang menunjukkan biaya hidup
 PNFk = Proporsi Non Makanan di Kabupaten
 PNFp = Proporsi Non Makanan di Propinsi

Karena garis kemiskinan merupakan fungsi COL, maka perbandingan garis kemiskinan antar kabupaten (GKK) dengan garis kemiskinan propinsi (GKP) dapat didekati dengan rasio proporsi non makanan di kabupaten k terhadap proporsi non makanan di propinsi p yang bersangkutan.

Ukuran kemiskinan berdasarkan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita terbagi dalam 2 wilayah (Sayogyo dalam Suryawati, 2005) :

1. Daerah Pedesaan, dengan kriteria :
 - a. Miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 - b. Sangat miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 - c. Melarat, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Daerah perkotaan, dengan kriteria :
 - a. Miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

- b. Sangat miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Melarat, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Selain ukuran kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait kemiskinan di dalam negeri, juga terdapat ukuran kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ada di luar negeri. *World Bank* menggunakan ukuran yang berbeda tentang kemiskinan dengan membuat garis kemiskinan absolut sebesar US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*Purchasing power parity*/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US\$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara/wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global/internasional. Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US\$ 1 di Amerika Serikat. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporannya pada *Human Development Report* (HDP) 1997, memperkenalkan ukuran kemiskinan dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*-HPI) yang diukur dalam 3 hal utama, yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun), pendidikan dasar diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, serta

keseluruhan ketetapan ekonomi (*economic provisioning*) yang diukur dengan melihat presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan. Apabila HPI semakin rendah maka menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Todaro (2011) mengungkapkan adanya sejumlah kriteria yang disepakati secara luas oleh para ekonom dalam menentukan tepat atau tidaknya suatu ukuran kemiskinan, yaitu prinsip anonimitas, independensi penduduk, monotonitas, dan sensitivitas distribusional. Prinsip monotonitas berarti jika ada penambahan pendapatan kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan semua pendapatan orang lain tetap, maka kemiskinan tidak mungkin lebih besar dari sebelumnya. Prinsip Distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lainnya sama, jika mentransfer pendapatan kepada orang miskin kepada orang yang lebih kaya maka perekonomian seharusnya dipandang menjadi lebih miskin. Disamping itu terdapat ukuran kemiskinan menurut *Foster-Greer-Thorbecker* yang dihitung dengan rumus :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^H \left(\frac{Y_p - Y_i}{Y_p} \right)^{\alpha} \quad (2.2)$$

Keterangan :

α = 0, 1, 2

Y_p = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

H = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

N = Jumlah penduduk

Jika :

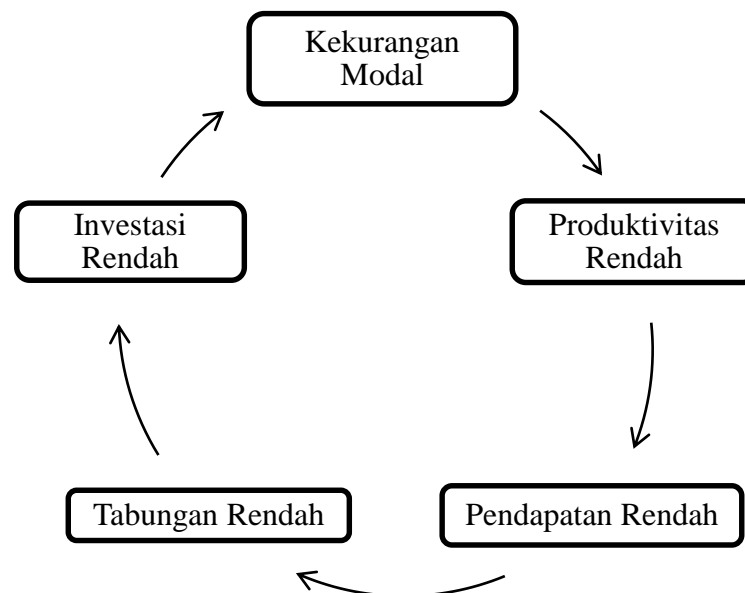
- $\alpha = 0$, maka diperoleh *Headcount Index* (P_0), yaitu presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- $\alpha = 1$, maka diperoleh *Poverty Gap Index* (P_1), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, makin jauh rata—rata pengeluaran penduduk di garis kemiskinan.
- $\alpha = 2$, maka diperoleh *Poverty Severty* (P_2), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.1.3 Teori Penyebab Kemiskinan

Sharp, dkk (dikutip dari Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang. Kedua, kemiskinan karena perbedaan akses modal. Ketiga, kemiskinan akibat perbedaan akses modal. Dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut bisa

dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Nurkse (dalam Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya juga rendah. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, kemudian rendahnya investasi tersebut akan menyebabkan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse



Sumber: Mudrajad Kuncoro, 2006

Nurkse menjelaskan kemiskinan merupakan keterkaitan beberapa faktor yang akan berujung pada kemiskinan. Gambar diatas dapat menjelaskan pendapat Nurkse yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia memang miskin).

Menurut Spicker (dalam Winarendra, 2014) penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam 4 Mazhab yang berbeda:

- a. *Individual Explanation*, kemiskinan dalam terminology karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu hasil dari kemalasan, kekurangan perorangan atau beberapa macam kekurangan atau kecacatan, seorang miskin karena membuat kesalahan pilihan, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal untuk bekerjadan sebagainya.
- b. *Familial explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjutnya sehingga terjadi ketidakberuntungan yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan.
- c. *Subcultural explanation*, kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal.
- d. *Structural explanation*, mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu kesenjangan yang diinterpretasikan oleh adanya divisi sosial, kelas, status atau kekuatan.

World Bank (1993) dalam *Policy Research Working Papers; Poverty and Policy* menjelaskan sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya demokrasi : hubungan kekuasaan menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah menjadi perhatian mereka,
2. Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk,
3. Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi,

4. Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik,
5. pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial,
6. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin, dan
7. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang mengacu bertambahnya pemupukan pendapatan dan kesejahteraan.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja memiliki skill yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak pro kemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang. Di beberapa negara, pemerintah membuat kebijakan tanpa peduli dengan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri sendiri.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut (Permana, 2012).

Cara Perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu unit kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu ; (1) Pertanian; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel, dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir.

Komponen-komponen tersebut meliputi :

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- b) Konsumsi pemerintah,
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto,
- d) perubahan stok,
- e) Ekspor *netto*.

3) Menurut Pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a) Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan

Menurut BPS Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2.1.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Todaro (2006) mengatakan pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Hal itu akan tercapai apabila tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara juga tinggi. Sejalan dengan itu, Kuncoro (2006) menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang memfokuskan pada usaha peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan dan pertumbuhan pendapatannya sangat lambat yaitu dibawah laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Selain itu,

syarat kecukupan (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan itu hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Karena hal tersebut, maka penurunan PDRB suatu daerah akan berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola konsumsi makanan pokoknya ke barang yang lebih murah dengan jumlah barang yang berkurang.

2.1.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting dan paling menentukan dalam melakukan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk meewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki potensi diri yang tinggi.

BPS (2014) membagi jalur pendidikan yang ada di Indonesia menjadi dua jenis, yaitu :

- a) **Pendidikan Formal**, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tersebut meliputi SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat dan Perguruan Tinggi.
- b) **Pendidikan Nonformal** yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tersruktur dan berjenjang. Pendidikan Non-formal meliputi kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan dapat diukur dengan berbagai satuan ukuran. Ukuran pendidikan yang umumnya digunakan dalam berbagai penelitian dan juga digunakan oleh BPS ada empat jenis, yaitu :

- 1) **Angka Buta Huruf** yaitu proporsi penduduk pada usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap usia tertentu. Metode perhitungan yang digunakan oleh BPS adalah sebagai berikut :

$$ABH\ 10\ Tahun\ Keatas = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang tidakbisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Catatan : Kelompok umur : 10 Tahun keatas, 15 tahun keatas, 15-44 tahun keatas, dan 45 tahun keatas.

- 2) **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Metode yang digunakan oleh BPS dalam menghitung APS adalah sebagai berikut :

$$APS\ 7 - 12\ tahun = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\% \quad (2.4)$$

Catatan : Kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18, 19-24 tahun)

- 3) **Angka Partisipasi Murni (APM)** yaitu proporsi anak sekolah pada satu kelompok usi tertentu yang sekolah pada jenjang yang sesuai pada jenjang usianya. BPS menggunakan metode untuk menghitung IPM sebagai berikut :

$$APM\ SD = \frac{\text{Jumlah murid SD usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usi 7-12 tahun}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Catatan : Jenjang SD/MI 7-12 tahun, SMP/MTS usia 13-15 tahun, SMA/MA usia 16-18 tahun, dan perguruan tinggi usia 19-24 tahun

- 4) **Angka Partisipasi Kasar (APK)** yaitu proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Metode yang digunakan BPS dalam menghitung APK adalah sebagai berikut:

$$APK\ SD = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\% \quad (2.6)$$

Catatan : APK SD/MI, APK SMP/MTs/, APK SMA/MA, atau APK PT

2.1.3.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia (Permana, 2012).

Investasi pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan kausalitas sumber daya manusia yang diperhatikan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas tinggi mampu memperoleh kesejahteraan yang lebih baik (Sitepu, 2010).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) menemukan bahwa pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal itu mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan yang paling penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.4 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman, dikutip dari Algotari, 2010). Pendapat lain menyebutkan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004). Ada beberapa jenis pengangguran, diantaranya adalah :

- 1) Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya :

a) Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan dengan pengangguran normal atau friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran berada pada tingkatan yang rendah karena pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja yang berdampak pada keputusan pengusaha untuk menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal tersebut mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan lamanya untuk memperoleh pekerjaan baru dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini para pekerja tadi tergolong dalam penganggur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai pengangguran normal.

b) Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang, adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha untuk menaikkan tingkat produksi. Hal tersebut akan membutuhkan tenaga kerja baru yang nantinya akan berdampak pada penurunan angka pengangguran. Disisi lain, adakalanya perekonomian akan mengalami penurunan permintaan agregat secara signifikan. Kondisi tersebut sering terjadi negara-negara produsen

bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan oleh turunnya harga-harga komoditas. Kemerostan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup perusahaannya sehingga akan meningkatkan angka pengangguran. Pengangguran seperti yang digambarkan tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c) Pengangguran Struktural

Suatu perekonomian pada kondisi tertentu akan merubah struktur ekonominya. Perubahan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti munculnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi, atau persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain. Perubahan struktur ekonomi tersebut akan menimbulkan kemunduran apabila suatu industri atau perusahaan tidak mampu mengimbangnya. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan produksi berhenti dan memaksa perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang berhentikan itulah yang disebut dengan pengangguran struktural.

d) Pengangguran Teknologi

Pengangguran bisa terjadi akibat dari adanya pergantian tenaga manusia oleh tenaga mesin yang dianggap lebih efisien. Apabila penggunaan tenaga mesin tersebut diterapkan pada industri padat karya, maka ledakan angka pengangguran bisa saja terjadi. Pengangguran seperti itu yang dinamakan dengan pengangguran teknologi.

2) Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya :

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat dari pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Sejalan dengan itu, BPS mendefinisikan pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b) Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah keadaan yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam suatu waktu tertentu. Keadaan ini biasanya terjadi di sektor pertanian karena petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d) Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. BPS menyebutkan jam kerja normal di indonesia adalah 35 jam seminggu. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja dibawah 35 jam dalam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

2.1.4.1 Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Tambunan (2001) mengatakan bahwa pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: 1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*. 2) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan juga didukung oleh teori lingkaran setan kemiskinan versi nurkse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai rendahnya produktivitas seseorang. Hal itu dikarenakan penganggur tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang nantinya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak pengangguran maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan terus bertambah.

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis (Tahun)	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah Rudastri & Lesta Karolina (2013)	PDRB konstan 2000, Tingkat pengangguran, dan Realisasi belanja APBD untuk pendidikan dan kesehatan. .	Regresi berganda dengan metode <i>OLS</i>	PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa tengah. Variabel realisasi belanja/belanja public berpengaruh positif signifikan. Sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2.	Analisi Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Ravi Dwi Wijayanto (2010)	Tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Variabel PDRB, Pendidikan dan Pengangguran sebagai variabel Independen	<i>Least Square Dummy Variabel (LSDV)</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel

				<p>pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.</p>
3.	<p>Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009</p> <p>Anggit Yoga Permana (2012)</p>	<p>Kemiskinan sebagai variabel dependen. PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Sebagai variabel independen dengan panel data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.</p>	<p><i>Ordinary Least Square Regression Analysis</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.</p>
4.	<p>Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah</p> <p>Dicky Wahyudi & Tri Wahyu (2013)</p>	<p>Tingkat kemiskinan sebagai Variabel dependen. Kesehatan, pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran sebagai Variabel</p>	<p><i>Least Square Dummy Variabel (LSDV)</i></p>	<p>Variabel Kesehatan, Pendidikan, dan Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.</p>

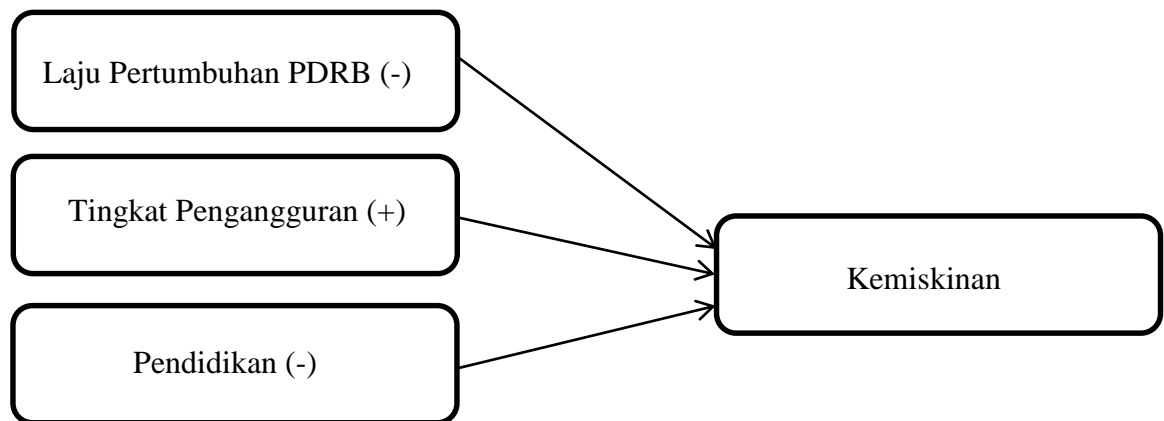
		Independen.		
5.	Analisi Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Perkotaan (Studi kasus 44 kota di Indonesia 2007-2010) DodyNursetyo & Gunanto (2013)	Kemiskinan sebagai variabel dependen. PDRB, Pengangguran dan Tingkat Infalsi sebagai variabel independen	<i>Least Square Dummy Variabel (LSDV)</i>	Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel Inflasi dan Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan empat variabel pembangunan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, tingkat pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan.

Pengangguran dapat menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan mempengaruhi distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kemudian ketiga variabel tersebut yang merupakan variabel independen bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan diregres untuk mendapatkan tingkat signifikansi pada setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Keempat variabel tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (Supranto, 1997). Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian adalah kemiskinan (P) yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2008-2013. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi meliputi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y), tingkat pengangguran (U), pendidikan (E) dan *dummy* (D) wilayah yang mewakili 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2013.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas dan memudahkan dalam memahami penggunaan variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Tingkat kemiskinan (P) adalah presentase penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah tahun 2008-2013. Data yang digunakan menggunakan satuan persen dan diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Y) dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas harga konstan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satuan persen, dan dihitung menggunakan rumus berikut :

$$Y_{it} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \dots\dots\dots(3.1)$$

dengan Y_{it} merupakan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota i tahun t , $PDRB_t$ merupakan PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota i tahun t , dan $PDRB_{t-1}$ merupakan PDRB atas harga konstan tahun sebelumnya.

3. Tingkat pengangguran terbuka (U) adalah presentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2008-2013. Data yang diambil dari BPS, dan menggunakan satuan persen.
4. Pendidikan (E) dinyatakan sebagai presentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang masih bersekolah menurut jenjang pendidikan yang sedang diduduki (SMA) di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2013. Data diambil dari BPS, dan menggunakan satuan persen.
5. *Dummy* (D) dinyatakan sebagai *dummy* wilayah yang mewakili 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2013. Data diambil dari BPS.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, berupa data-data yang menunjang dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2008 - 2013 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 210 observasi.

Pemilihan periode ini berdasarkan fenomena peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang tidak diikuti oleh tingkat kemiskinan yang rendah, sehingga penelitian pada periode tersebut menarik untuk diamati serta mempertimbangkan ketersediaan data pada tahun tersebut.

Data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data presentase penduduk miskin daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Data laju produk domestik regional bruto atas dasar harga kontan untuk masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2008-2013
3. Data pendidikan yang diproksi dengan angka partisipasi kasar untuk masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2008-2013.
4. Data pengangguran terbuka untuk masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013.

Adapun sumber data tersebut diperoleh dari :

1. Data presentase penduduk miskin daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013, yaitu dari

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Data dan Informasi Kemiskinan”.

2. Data laju produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan untuk masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “PDRB Jawa Tengah”.
3. Data pendidikan yang diproksi dengan angka partisipasi kasar untuk masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Statistik dan Kependudukan Jawa Tengah”.
4. Data Pengangguran untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2013, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah”.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti (Dajan, 2001).

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Metode Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 8. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross-section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross-section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Dalam model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana T adalah banyaknya data *time-series*.

Data panel merupakan gabungan dari *cross-section* dan *time-series*, sehingga

model yang digunakan dapat dituliskan dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Menurut Hsiao, 1986 (dikutip dalam Firmansyah) keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan oleh data *cross-section* dan *time-series* saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam *inferensi* perubahan dinamis dibandingkan data *cross-section*.

Ada dua macam pendekatan dalam analisis model panel data yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*fixed effect*)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Bentuk persamaan model efek tetap sebagai berikut :

2. Pendekata efek acak (*Random effect*)

Keputusan untuk memasukan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang ada di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu dan karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen eror (*error component model*) atau disebut juga efek model acak (*random effect*).

Menurut Judge ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

1. Apabila jumlah *Time Series* (T) lebih besar daripada jumlah *cross section* (N), maka hasil dari keduanya tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model* (FEM).
2. Apabila N lebih besar daripada T, maka hasil estimasi keduanya akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross effect* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random), maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak, maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
3. Apabila komponen *error* ϵ_i individual berkorelasi maka penaksir *random effect* lebih akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N lebih besar dari T, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

3.4.2 Estimasi Model

Penelitian ini mengenai pengaruh variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendidikan (E) dan variabel tingkat pengangguran (U) terhadap tingkat kemiskinan (P) menggunakan data *times-series* selama enam tahun yang diwakili data tahunan dari tahun 2008-2013 dan data *cross-section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 210 observasi.

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada

intersep, koefisien slope, dan *error term*, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan (E) dan variabel tingkat pengangguran (U) terhadap tingkat kemiskinan (P) digunakan asumsi *FEM* dikarenakan N besar dan T kecil, selain itu bahwa unit *cross-section* yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak sehingga harus menggunakan *FEM*. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi *FEM* yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Jawa Tengah periode 2008-2013 yaitu :

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 E_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

dimana :

P = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah

U = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah

E = angka partisipasi kasar SMA kabupaten/kota di Jawa Tengah

α_0 = intersep

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien regresi variabel bebas

μ_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i

i = 1, 2, 3, ..., 35 (data *cross section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)

t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (data *time series*, tahun 2008-20013)

3.4.3 Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Variabel

Dummy

Penelitian ini menggunakan *dummy* wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 6 tahun periode penelitian (tahun 2008-2013) dimana Kota Semarang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai *benchmark* adalah Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Setelah memasukkan variabel *dummy* wilayah pada persamaan 3.7 maka model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 P_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 E_{it} + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 + \gamma_5 D_5 + \gamma_6 D_6 \\
 & + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \gamma_{11} D_{11} + \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} + \gamma_{14} D_{14} + \\
 & \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \gamma_{19} D_{19} + \gamma_{20} D_{20} + \gamma_{21} D_{21} + \\
 & \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \gamma_{25} D_{25} + \gamma_{26} D_{26} + \gamma_{27} D_{27} + \gamma_{28} D_{28} + \\
 & \gamma_{29} D_{29} + \gamma_{30} D_{30} + \gamma_{31} D_{31} + \gamma_{32} D_{32} + \gamma_{33} D_{33} + \gamma_{34} D_{34} + \mu_{it} \\
 & \dots\dots\dots(3.6)
 \end{aligned}$$

dimana :

P = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah

U = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah

E = angka partisipasi kasar SMA kabupaten/kota di Jawa Tengah

D_1 = *dummy* Kabupaten Cilacap

D_2 = *dummy* Kabupaten Banyumas

D_3 = *dummy* Kabupaten Purbalingga

D_4 = *dummy* Kabupaten Banjarnegara

D_5 = *dummy* Kabupaten Kebumen

D_6 = *dummy* Kabupaten Purworejo

D_7 = *dummy* Kabupaten Wonosobo

D_8 = *dummy* Kabupaten Magelang

D_9 = *dummy* Kabupaten Boyolali

D_{10} = *dummy* Kabupaten Klaten

D_{11} = *dummy* Kabupaten Sukoharjo

D_{12} = *dummy* Kabupaten Wonogiri

D_{13} = *dummy* Kabupaten Karanganyar

D_{14} = *dummy* Kabupaten Sragen

D_{15} = *dummy* Kabupaten Grobogan

D_{16} = *dummy* Kabupaten Blora

D_{17} = *dummy* Kabupaten Rembang

D_{18} = *dummy* Kabupaten Pati

D_{19} = *dummy* Kabupaten Kudus

D_{20} = *dummy* Kabupaten Jepara

$D_{21} = \text{dummy Kabupaten Demak}$

$D_{22} = \text{dummy Kabupaten Semarang}$

$D_{23} = \text{dummy Kabupaten Temanggung}$

$D_{24} = \text{dummy Kabupaten Kendal}$

$D_{25} = \text{dummy Kabupaten Batang}$

$D_{26} = \text{dummy Kabupaten Pekalongan}$

$D_{27} = \text{dummy Kabupaten Pemalang}$

$D_{28} = \text{dummy Kabupaten Tegal}$

$D_{29} = \text{dummy Kabupaten Brebes}$

$D_{30} = \text{dummy Kota Magelang}$

$D_{31} = \text{dummy Kota Surakarta}$

$D_{32} = \text{dummy Kota Salatiga}$

$D_{33} = \text{dummy Kota Pekalongan}$

$D_{34} = \text{dummy Kota Tegal}$

$\alpha_0 = \text{intersep}$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = \text{koefisien regresi variabel bebas}$

$\gamma_1 - \gamma_{34} = \text{koefisien dummy wilayah}$

$\mu_{it} = \text{komponen error di waktu } t \text{ untuk unit } \textit{cross section} \textit{ } i$

$i = 1, 2, 3, \dots, 34 \text{ (data } \textit{cross section} \textit{ kabupaten/kota di Jawa Tengah)}$

$t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \text{ (data } \textit{time series}, \text{ tahun } 2008\text{-}2013)$

Model persamaan (3.6) tersebut akan diregres dengan menggunakan metode *Ordinary Least square* (OLS).

3.5 Hausman Test

Untuk menentukan secara tepat spesifikasi model yang akan digunakan apakah model *fixed effect* atau *random effect* maka dilakukan uji Hausman untuk menguji model yang paling baik yang akan digunakan dalam estimasi. Uji Hausman akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-Square Statistics* sehingga keputusan pemilihan model dapat ditentukan secara benar. Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap *fixed effect model* atau *dummy variable model*, sehingga semakin besar nilai statistik Hausman tersebut semakin mengarah pada penerimaan dugaan *error component model* (Baltagi, dikutip dari Permana 2010).

3.6 Deteksi Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual. Dibandingkan dengan metode lain, *Ordinary Least Squares* merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. Sebagai estimator, *Ordinary Least Squares* merupakan metode regresi dengan keunggulan sebagai estimator linear terbaik yang tidak bias atau biasa dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga hasil perhitungan *Ordinary Least Squares* dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Namun, untuk menjadi sebuah estimator yang baik dan tidak bias, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi.

Gujarati (2003) menyebutkan bahwa kesepuluh asumsi yang harus dipenuhi. *Pertama*, model persamaan berupa linear. *Kedua*, nilai variabel

independen tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang. *Ketiga*, nilai rata-rata penyimpangan sama dengan nol. *Keempat*, *homocedasticity*. *Kelima*, tidak ada autokorelasi antara variabel. *Keenam*, nilai *covariance* sama dengan nol. *Ketujuh*, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. *Kedelapan*, nilai variabel independen yang bervariasi. *Kesembilan*, model regresi harus memiliki bentuk yang jelas. *Kesepuluh*, adalah tidak adanya *multicolinearity* antar variabel independen. Terpenuhiya kesepuluh asumsi di atas menjadikan hasil regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi.

3.6.1 Deteksi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2002). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X^2 (Chi Square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah:

$$J - B \text{ hitung} = [S^2/6 + (\frac{k-3}{24})^2] \dots\dots\dots(3.7)$$

dimana

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai $J - B$ hitung $>$ $J-B$ tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

3.6.2 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila nilai R^2 yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinearitas (Imam Ghozali, 2005)

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model adalah sebagai berikut:

- 1) Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R^2 .
Jika nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat multikolinearitas.
- 2) Melakukan regresi parsial. Menggunakan *auxiliary regression* pada masing-masing variabel independen, kemudian membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model regresi parsial. Jika nilai R^2 dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinearitas.

3.6.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana komponen *error* pada periode/observasi tertentu berkorelasi dengan komponen *error* pada periode/observasi lain yang berurutan. Dengan kata lain, komponen *error* tidak *random* (Gujarati, 2003).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Lagrange Multiplier* (uji LM). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu u_t dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde p sebagai berikut:

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \dots + \rho_p u_{t-p} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.8)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 \dots \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual jika $(n-p) \cdot R^2$ atau χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ditolak.

3.6.4 Deteksi Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi untuk memenuhi homoskedastisitas, yaitu komponen *error* sama untuk semua pengamatan. Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

Heteroskedastisitas muncul apabila *error* atau *residual model* yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan *Uji White*. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (ut^2) dengan variabel bebas. Hasil estimasi didapat nilai R^2 , untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ^2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

3.6.5 Metode *Newey-West* untuk Memperbaiki Standard Error OLS

Penggunaan metode *Newey-West* untuk memperbaiki standard error OLS merupakan perluasan dari standard error heteroskedastisitas–konsisten White yang juga dikenal sebagai *standard error HAC (heteroscedasticity-and autocorrelation-consistent)*. Jika sebuah sample cukup besar menggunakan metode *Newey-West* untuk mengoreksi standard error autokorelasi dan juga heteroskedastisitas (Gujarati, 2012).

Keberadaan heteroskedastisitas dan autokorelasi akan mengakibatkan rumus *standard error* tidak lagi benar karena *standard error* akan *underestimate* dari *standard error* yang sebenarnya. Selain itu statistik uji t, F, dan LM tidak akan valid. Metode *standard error Newey West* merupakan perluasan *standard error White*. Metode *standard error White* hanya *robust* terhadap heteroskedastisitas, sedangkan *standard error Newey West robust* terhadap

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Rumus *standart error Newey West* adalah sebagai berikut (Wooldridge, 2009) :

$$se_{\text{newey-west}}(\beta_p) = \left(\frac{se(\beta_p)}{\sigma} \right)^2 \times \sqrt{v} \quad (3.9)$$

Nilai v dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$v = \sum_{t=1}^n \alpha_t^2 + 2 \sum_{t=1}^n \left[1 - \frac{h}{g+1} \right] (\sum_{t=h+1}^n \alpha_t \alpha_{t-h}) \quad (3.10)$$

3.7 Uji Signifikansi

Uji signifikansi terdiri dari (1) Uji *Goodness of Fit*, (2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F), dan (3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).

3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (uji *goodness of fit*). Koefisien ini nilainya antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Semakin besar nilai koefisien tersebut maka variabel-variabel independen lebih mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh model tersebut dapat dibenarkan (Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

- 1) Sebagai ukuran ketepatan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Apabila nilai R^2 semakin besar maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya, apabila semakin kecil nilai R^2 maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
- 2) Untuk mengukur proporsi atau presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara (1) Menentukan Hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a), (2) Menentukan *level of significance* (α) tertentu, (3) Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung, dan (4) Menarik Kesimpulan.

Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Nilai Fhitung dicari dengan cara sebagai berikut:

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)} \quad (3.11)$$

dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah observasi

3.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005) :

- 1) Bila jumlah *degree of freedom (df)* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai t statistik dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t statistik hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

$H_1 : \alpha_1 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel laju pertumbuhan PDRB secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_2 : \alpha_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel tingkat pengangguran secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

H₃: $\alpha_3 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel pendidikan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

H₄: $\gamma_1, \dots, \gamma_{35} > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif pada *dummy* variabel wilayah (35 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.